

BAB II

DINAMIKA INFLASI TURKI SERTA KETERKAITANNYA DENGAN KRISIS ENERGI

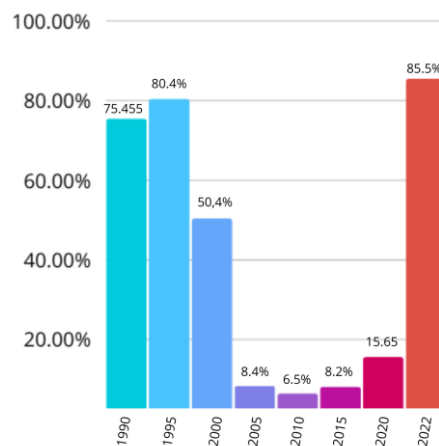
Inflasi di Turki telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dengan beberapa periode mencatat inflasi lebih dari 80% pada tahun 2022. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga energi dan komoditas akibat perang Rusia-Ukraina. Namun, sebelum terjadinya perang Rusia-Ukraina, inflasi di Turki telah mengalami gejala sejak tahun sebelumnya. Pada April 2021, tingkat inflasi mencapai 16 persen, setelah mengalami kenaikan berturut-turut selama enam bulan sebelumnya dan dua kali lipat dalam kurun waktu empat tahun terakhir (CNN, 2022).

Kebijakan suku bunga yang tidak efektif serta campur tangan Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam kebijakan Bank Sentral telah mengikis kredibilitas moneter Turki di mata investor asing. Kebijakan suku bunga yang rendah tidak mampu mengendalikan inflasi, menyebabkan depresiasi nilai tukar lira dan peningkatan harga impor bahan mentah serta energi. Perang Rusia-Ukraina memperburuk kondisi ini dengan kenaikan signifikan harga minyak dan gas. Biaya transportasi, termasuk harga gas dan solar, meningkat 224% pada Mei 2022 dibandingkan dengan Mei 2021. Harga makanan dan minuman non-alkohol juga hampir dua kali lipat selama setahun terakhir, mencapai 91,6% pada bulan Mei 2022. Keadaan ini telah menimbulkan ketakutan eksistensial yang sangat nyata di kalangan masyarakat Turki. Ekonom Murat Birdal dari Universitas Istanbul menyalahkan Bank Sentral Turki atas inflasi tinggi ini, karena tidak bertindak

secara independen dan gagal menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi (Kirby, 2023) .

2.1 Dinamika Inflasi Turki

Fenomena Inflasi Turki tidak hanya memiliki akar penyebab yang kompleks, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada ekonomi dan masyarakat Turki. Salah satu faktor utama terjadinya inflasi adalah kebijakan moneter yang tidak efektif. Kebijakan penurunan suku bunga seringkali dipaksakan oleh pemerintah yang kemudian mengganggu stabilitas ekonomi dan memperburuk inflasi.



Grafik 2. Dinamika naik turun inflasi Turki

Sumber : (Trading Economics 2023)

Sejak tahun 1990an, Turki mengalami inflasi yang disebabkan adanya pengeluaran pemerintah yang tinggi, ketidakstabilan kebijakan moneter, dan guncangan eksternal seperti embargo minyak tahun 1973 dan krisis utang 1980-an. Pada 1990 dan awal 2000, inflasi tetap tinggi, dengan tingkat inflasi tahunan rata-rata sekitar 50 persen. Pemerintah menerapkan beberapa reformasi ekonomi,

termasuk program stabilisasi pada tahun 2000-2001, namun upaya ini tidak berhasil mengurangi inflasi (Globaldata, 2022).

Pada pertengahan tahun 2000 hingga 2010, inflasi mulai menurun secara bertahap, dengan tingkat inflasi tahunan rata-rata di bawah 10%. Periode ini ditandai dengan penerapan reformasi kebijakan moneter dan pembentukan Bank Sentral Republik Turki (CBRT) sebagai institusi independen. Namun, pada 2020-an, inflasi kembali meningkat, didorong oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 dan gangguan rantai pasokan global. Tingkat inflasi tahunan naik menjadi 85,5% pada Oktober 2022, level tertinggi dalam 24 tahun terakhir (Globaldata, 2022).

Krisis energi memainkan peran signifikan dalam lonjakan inflasi ini. Turki sangat bergantung pada impor energi, terutama minyak dan gas, yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Konflik antara Rusia dan Ukraina, yang dimulai pada Februari 2022, menyebabkan kenaikan tajam harga energi global, semakin memperburuk tekanan inflasi di Turki (Aljazeera, 2022).

Lira Turki, yang sudah mengalami depresiasi signifikan terhadap dolar AS, terus melemah sebagai respons terhadap krisis energi. Hal ini menyebabkan kenaikan tajam biaya impor, termasuk energi, dan memicu inflasi lebih lanjut. Pemerintah Turki menanggapi lonjakan inflasi dengan menerapkan serangkaian langkah, termasuk pemotongan pajak pada produk dasar dan subsidi pemerintah untuk tagihan utilitas. Namun, langkah-langkah ini tidak cukup untuk menghentikan laju inflasi, dan tingkat inflasi tahunan terus meningkat. Lira turun 0,25% terhadap dolar menjadi 16,505, level terendah sejak Desember 2021. Krisis

energi terus memainkan peran signifikan dalam tekanan inflasi di Turki, dengan harga minyak dan gas tetap tinggi. Konflik antara Rusia dan Ukraina, yang dimulai pada Februari 2022, tidak menunjukkan tanda-tanda penyelesaian, dan pasar energi global tetap bergejolak (Aljazeera, 2022).

2.1.1 Kebijakan Moneter Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam

Menghadapi Inflasi 2022

Sejak *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP) yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan berkuasa pada tahun 2002, Turki telah menghadapi dampak krisis keuangan yang parah pada tahun 2001 yang diperburuk oleh ketidakstabilan politik dan masalah ekonomi. Pembangunan ekonomi Turki bergantung pada aliran investasi asing yang besar, tetapi membutuhkan dukungan keuangan yang memadai untuk pertumbuhan berkelanjutan. Defisit anggaran dan inflasi yang tinggi menyebabkan keruntuhan pasar saham terburuk sejak Perang Dunia II. Hingga kini, pemerintah menerapkan strategi ekonomi yang agresif berbasis proyek infrastruktur mahal, menarik investor asing serta mendorong dunia usaha dan konsumen untuk berutang (Cruz, 2023).

Dalam situasi ini, reformasi pemerintahan memungkinkan Turki berkembang pesat pada 2000-an. Turki muncul sebagai "keajaiban ekonomi" di kancah internasional: tingkat kemiskinan menurun dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Turki juga berhasil menghadapi krisis keuangan global 2007-2009. Meskipun pertumbuhan PDB melambat menjadi 0,6% pada tahun 2008 dan

mengalami resesi sebesar -4,8% pada tahun 2009, ekonomi Turki kemudian tumbuh pesat dengan tingkat pertumbuhan 8,4% pada tahun 2010 dan 11,2% pada tahun 2011. Sistem keuangan yang dibangun kembali sangat bergantung pada impor modal dan sumber daya yang tinggi tanpa mampu menghasilkan surplus perdagangan luar negeri yang cukup untuk menyeimbangkannya. Meskipun beberapa ketegangan politik memperkuat posisi Erdogan dalam AKP, ekonomi mulai tunduk pada kekuasaan pemerintahan yang semakin tersentralisasi. Kurangnya fleksibilitas ekonomi terhadap kekuatan politik dan defisit transaksi berjalan yang negatif menyebabkan ekonomi menjadi terlalu panas, menghadapi krisis mata uang lainnya pada tahun 2018. Hal ini diikuti oleh situasi di mana perusahaan-perusahaan Turki, yang sebagian besar sangat bergantung pada pinjaman luar negeri, mengalami kesulitan besar dalam membayar utang mereka dalam mata uang Dolar (Cruz, 2023).

.Situasi memburuk pada September 2021 dengan penerapan Program Ekonomi Baru (NEP) yang tidak konvensional. Berlandaskan pada keyakinan Erdogan bahwa suku bunga tinggi akan memicu inflasi, NEP bertujuan untuk menurunkan suku bunga secara agresif guna mendevaluasi Lira Turki, meningkatkan ekspor, memperkuat Lira, mengendalikan inflasi, dan memperkuat cadangan devisa bank sentral. Namun, tidak satu pun dari tujuan tersebut yang terwujud. Meskipun ada intervensi signifikan dari bank sentral, nilai tukar dolar terhadap Lira Turki anjlok dari 8,5 Lira pada September 2021 menjadi 26 Lira pada Juli 2023. Inflasi meroket (mencapai puncak 85,5% pada November 2022), dan cadangan devisa bersih bank sentral berubah menjadi negatif untuk pertama

kalinya sejak tahun 2002. Meskipun NEP gagal, pemerintah tetap mempertahankan pendekatan yang tidak lazim. Di bawah pengaruh Erdogan, Bank Sentral Turki (CBRT) dan Badan Regulasi dan Pengawasan Perbankan (BRSA) terus mendukung kebijakan suku bunga rendah meskipun efektivitasnya sudah berkurang. Selama kampanye pemilu tahun 2023, Erdogan hampir tidak menunjukkan kecenderungan untuk mengubah pendekatan tersebut, dan menafsirkan kemenangan AKP dalam pemilu parlemen sebagai dukungan terhadap kebijakannya (Demiralp, 2023).

Meskipun Erdogan gigih dalam mempertahankan suku bunga rendah, kondisi keuangan yang semakin kritis membuatnya mempertimbangkan apakah mengubah kebijakan ekonominya adalah pilihan terbaik. Akibatnya, Erdogan memberikan sinyal kepada investor internasional dengan mengangkat kembali Mehmet Şimşek sebagai Menteri Keuangan dan Hafize Gaye Erkan sebagai Gubernur CBRT. Penunjukan ini disambut baik oleh para analis ekonomi karena dukungan mereka terhadap independensi bank sentral dan disiplin fiskal, yang menunjukkan potensi perubahan sikap Erdogan dan kesediaannya untuk meninjau kembali kebijakan moneter yang tidak konvensional. Dalam upayanya mempertahankan perekonomian, Turki kemudian mempromosikan dirinya sebagai pusat energi regional dan menjadikan sektor energi sebagai lanskap investasi yang menjanjikan serta melakukan upaya diversifikasi energi untuk membuat keamanan energinya lebih stabil karena inflasi yang terjadi dipicu juga oleh ketidakstabilan pasokan energi dan harga energi global (Cruz, 2023).

2.2 Turbulensi Keamanan Energi Turki

Terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina mengubah sistem energi global secara signifikan. Pola yang dilakukan terhadap perdagangan gas alam dan minyak berubah dramatis sejak invasi Rusia terhadap Ukraina dilancarkan pada Februari 2022. Invasi yang dilakukan Rusia tersebut ditentang oleh negara-negara khususnya Barat, mereka melakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia dengan cara embargo, namun Rusia juga melakukan serangan balasan dengan memainkan harga minyak dan gas alam. Harga yang diberlakukan Rusia terhadap negara satu dengan negara lainnya berbeda, tergantung hubungan yang dijalin. (Göral, 2023). Pada tahun 2022, harga impor gas alam dari Rusia ke wilayah Eropa (termasuk Turki) mencapai \$983.8 /1000 meter kubik, karena mayoritas eropa berafiliasi dengan Barat dan memberlakukan sanksi ekonomi. Sementara itu, bagi Asia yang tidak memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia, harga gas alam berada di angka \$297.3/1000 meter kubik (Reuters, 2023).

Turki bukanlah negara penghasil energi sendiri. Sebanyak $\frac{3}{4}$ kebutuhan energi Turki dipenuhi secara impor dari negara-negara penghasil energi, terutama Rusia karena sebanyak 44.5% pasokan energi Turki berasal dari Rusia. Mengingat kebutuhan Turki terhadap impor gas alam Rusia sangat tinggi, adanya kondisi permainan harga minyak dan gas alam yang dilakukan Rusia mengganggu stabilitas keamanan energi Turki dan menyebabkan inflasi. Krisis dan inflasi tinggi yang dialami Turki menggambarkan bahwa ketergantungan Turki terhadap pasokan energi gas alam Rusia akan berakibat fatal apabila stabilitas regional

terganggu. Hal tersebut juga berdampak pada banyak sektor lainnya di Turki, terutama perekonomian (Topcu, 2022).

Dampak negatif dari impor energi pada tahun 2022 ini mencapai puncaknya. Anggaran untuk energi Turki mencapai \$97,1 miliar, sehingga menciptakan defisit perdagangan energi sebesar \$81,1 miliar, meningkat dari \$42,4 miliar pada tahun 2021. Kenaikan yang signifikan ini disebabkan oleh lonjakan harga energi setelah Rusia melakukan invasi ke Ukraina, dengan harga gas alam meningkat hingga 310% dalam satu tahun menciptakan tantangan yang mempengaruhi stabilitas perekonomian negara tersebut (Siccardi, 2024). Konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi titik tambahan baru dalam ketidakstabilan ekonomi Turki, mempengaruhi strategi ekspor dan ketergantungan pada sektor-sektor penting dalam negeri.

Saat pasokan utama energi Turki mengalami kenaikan, maka sektor lainnya pun akan terdampak. Hal tersebut dikarenakan untuk memenuhi perputaran ekonomi masyarakat, Turki membutuhkan energi yang memadai dalam proses produksi maupun distribusi ekonominya. Sektor transportasi mencatat peningkatan harga yang paling signifikan, mencapai 224% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Di tempat kedua, terdapat peningkatan harga pada kategori makanan dan minuman non-alkohol sebesar 94%. Sementara itu, perkakas rumah tangga menempati peringkat ketiga dengan kenaikan harga mencapai 81%. Secara keseluruhan, tingkat inflasi saat ini mencapai titik tertinggi sejak September 1998, dengan tingkat inflasi tahunan mencapai 80,4%. Hal ini terjadi pada saat Turki menghadapi tantangan inflasi tinggi yang berkelanjutan

selama satu dekade. Kondisi inflasi ini diperpanjang dengan kebijakan presiden Erdogan yang memangkas suku bunga dan tidak mengikuti arahan WTO dalam menghadapi inflasi. WTO merekomendasikan bahwa untuk menangani inflasi, bank sentral haruslah menaikkan suku bunga, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan yang dilakukan Erdogan (BBC, 2022).

Turki menghadapi tantangan signifikan terkait ketergantungan energinya. Kebutuhan energi di Turki terus meningkat dalam kurun waktu dua dekade terakhir, dan proyeksi menunjukkan bahwa kondisi ini akan berlanjut hingga setidaknya tahun 2035. Namun, Turki tidak memiliki sumber daya alam yang memadai untuk memenuhi kebutuhan energinya, tetapi mengatasi dengan terpaksa mengimpor hampir kebutuhan energinya secara menyeluruh. Ketergantungan impor energi tersebut menghasilkan konsekuensi ekonomi dan keamanan yang signifikan bagi Turki. Secara ekonomi, keputusan strategis untuk mencari diversifikasi dalam pasar energi telah mempengaruhi arah dan laju pertumbuhan ekonomi Turki. Dari segi keamanan, ketergantungan pada sumber energi asing telah meningkatkan kerentanan Turki terhadap gangguan eksternal, sehingga menciptakan tantangan yang mempengaruhi posisi internasional negara tersebut (Siccardi, 2024).

Korelasi yang kuat antara kepentingan ekonomi dan keamanan energi menjadi jelas dalam konteks Turki. Perekonomian Turki yang berjalan dengan kuat, sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil. Setiap sektor ekonomi di Turki, dengan tingkat konsumsi energi yang tinggi, bergantung pada ketersediaan energi yang andal. Oleh karena itu, penting untuk menyelaraskan

kepentingan ekonomi dengan penyediaan energi yang memadai. Dengan ketergantungan yang kuat antara pasokan energi dan kestabilan ekonomi, upaya untuk memastikan ketersediaan energi yang memadai menjadi krusial bagi Turki. Dalam konteks hukum ekonomi, ketidakseimbangan antara permintaan yang meningkat dan pasokan energi yang terbatas dapat mengakibatkan instabilitas harga yang merugikan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada sektor ekonomi secara keseluruhan (Priyono, 2012), . Oleh karena itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang bersifat kontinuitas, diperlukan ketahanan energi yang dapat diandalkan dan berkelanjutan.

2.2.1 Hubungan Turki dengan Negara Pemasok Gas Alam Utama

Posisi geostrategis Turki dalam perdagangan gas alam internasional merupakan faktor penting yang mempengaruhi keamanan energi negara tersebut. Dalam proses distribusi gas alam dari satu negara pemasok ke negara lainnya, Turki merupakan negara yang berperan penting dalam proses distribusi. Secara geografis, wilayah Turki berada di perbatasan antara benua Asia dan Eropa, sehingga menyebabkan negara yang melakukan transaksi jual beli minyak dan gas alam di wilayah tersebut akan transit di Turki. Meskipun demikian, Turki bukanlah negara penghasil energi sendiri. Sebanyak $\frac{3}{4}$ kebutuhan energi Turki dipenuhi secara impor dari negara-negara penghasil energi. Selama dekade terakhir, Turki berada di urutan nomor dua setelah China dalam hal pertumbuhan permintaan gas dengan diiringi pertumbuhan ekonomi dan populasi sebanyak 80

juta orang, pertumbuhan tersebut menjadikan Turki sebagai salah satu konsumen energi dan pertumbuhan tercepat di dunia (Austvik, et.al.,2016).

Walaupun Turki tidak memiliki simpanan gas alam yang besar, negara ini memiliki keuntungan strategis karena posisinya sebagai pusat transit energi. Banyak yang meyakini bahwa mengontrol jalur transportasi energi sama pentingnya dengan mengontrol pasokan energinya. Dengan posisi geostrategis yang berada di antara pemasok dan konsumen energi utama, Turki memiliki potensi untuk berperan secara signifikan di pasar energi global. Upaya telah dilakukan oleh Turki dan pemangku kepentingan global lainnya untuk memperkuat perannya sebagai pusat energi, menunjukkan pentingnya peran negara tersebut dalam sistem energi dunia. Dengan posisinya yang demikian, Turki turut menjadi agregator (mengumpulkan dan menyatukan pasokan energi dari berbagai sumber, yang kemudian menjadi satu tempat yang mudah diakses oleh para negara konsumen energi), serta menjadi koridor transit di wilayahnya. Dengan berbagai langkah demikian, Turki tidak hanya mendapatkan keamanan energi untuk negaranya sendiri, tetapi juga berperan dalam menjaga keamanan energi secara global (Tekin, et. al., 2007).

Praktik kerjasama yang dilakukan Turki dalam menjaga keamanan energinya yang sebagian besar dihasilkan dari impor terbagi kedalam beberapa perjanjian. Perjanjian-perjanjian tersebut bersifat kontrak, sehingga kondisi geopolitik yang fluktuatif juga turut berperan dalam pasokan energi yang didapatkan Turki.

Tabel 1. Turkey's Natural Gas Purchase Agreements

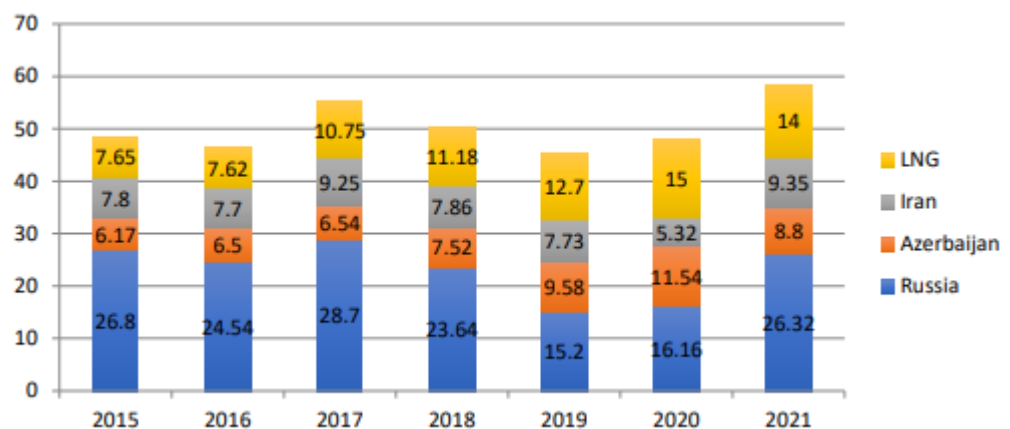
No	Perjanjian	Banyaknya (BCM/tahun)	Tanggal Kontrak	Durasi (tahun)	Kadaluarsa
1	Russian Fed. (West)	6	14 Februari 1986	25	2011
2	Algeria (LNG)	4	14 April 1998	20	2018
3	Nigeria (LNG)	1.2	9 November 1995	22	2017
4	Iran	10	8 Agustus 1996	25	2021
5	Russian Fed. (Blue Stream)	16	15 Desember 1997	25	2022
6	Rus. Fed. (West)	8	18 Februari 1998	23	2021
7	Turkmenistan	16	21 Mei 1999	30	2029
8	Azerbaijan (Phase 1)	6.6	12 Maret 2001	15	2016
9	Azerbaijan (Phase 2)	6	25 November 2011	15	2016
10	Azerbaijan (TANAP)	6	20 Mei 2014	49	2063
11	Russia (Turk Stream)	15.75	10 November 2016	49	2065
12	Greece (Sell)	0.75	10 April 2007	15	2022

Sumber : BOTAS, 2018.

Dalam perjanjian impor gas alam tersebut, terdapat tiga negara utama yang menjadi pemasok gas alam jangka panjang, yaitu Rusia, Azerbaijan, serta Iran, kontrak-kontrak jangka panjang tersebut berakhir pada sekitar tahun 2020 (Austvik, et.al.,2016). Dapat dilihat bahwa dari perjanjian yang ada, Rusia mendominasi pasokan impor gas alam Turki dengan total 45,75 BCM/ tahun dari

total 96,3 BCM/tahun atau sekitar 47% dari total impor. Sehingga hampir setengah dari pasokan energi Turki berasal dari Rusia.

Kondisi hubungan Turki dengan negara-negara importir juga bersifat dinamis. Konflik-konflik yang terjadi baik antara Turki dengan negara tersebut secara langsung, maupun antara negara importir dengan negara lainnya cukup mempengaruhi jumlah dan nilai pasokan. Konsentrasi produksi global di beberapa wilayah dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar energi. Hal tersebut tidak menguntungkan baik untuk konsumen maupun produsen. Disebabkan karena jumlah produsen energi utama yang sedikit, maka setiap perubahan kebijakan atau ketidakstabilan produksi yang dilakukan produsen akan berakibat pada naik turunnya harga energi di pasaran, tentu saja hal tersebut berdampak buruk pada negara *supplier* maupun *buyer*. Sebagai negara transit, Turki memiliki potensi untuk meningkatkan diversifikasi geografis sumber daya energi untuk membantu mengendalikan gejolak harga (Tekin, et. al., 2007).



Grafik 3. Impor gas Turki berdasarkan sumber (dalam bcm) tahun 2015-2021

Source : The Oxford Institute For Energy Studies, 2022

Seperti yang tercantum pada grafik, setiap tahunnya *supply* energi gas alam yang diterima Turki mengalami kondisi naik turun. Faktor-faktor yang dapat memicu naik turunnya pasokan energi gas alam yang diterima oleh Turki dapat disebabkan oleh kondisi geopolitik yang tidak stabil. Pada tahun 2019, terjadi penurunan pasokan gas alam dari Rusia yang menurun cukup drastis, hal tersebut disebabkan karena adanya ketegangan antara Turki dan Rusia pada konflik Idlib di Suriah. Kondisi ini melibatkan pasukan rezim Suriah yang mendapat dukungan dari Rusia melakukan serangan terhadap pemberontak yang didukung Turki. Terjadi insiden penembakan pasukan Turki oleh pasukan Suriah pada Februari 2019, sehingga menyebabkan beberapa tentara Turki kehilangan nyawa. Kondisi tersebut menambah ketegangan hubungan antara Turki dan Rusia, dan berimplikasi pada jumlah pasokan-permintaan energi gas alam (BBC, 2020)

Rangkaian naik turun pasokan energi yang diterima Turki juga dipengaruhi dengan bertambahnya tali persahabatan antar negara maupun adanya ketegangan yang dialami Turki dengan negara-negara pemasok. Selain itu, kondisi secara internal seperti pertumbuhan ekonomi, kebijakan energi domestik, atau kondisi perubahan cuaca, turut berpengaruh terhadap permintaan *supply* energi Turki. Kebijakan terhadap energi domestik juga dipengaruhi kontrak-kontrak jangka pendek dan jangka panjang dengan para produsen gas alam, termasuk kebijakan mengenai regulasi harga dan impor. Kemudian juga kapasitas yang ditampung terminal LNG (*Liquefied Natural Gas*) sebagai tempat penerimaan, penyimpanan, pengkondensasian, serta pelunakan gas alam cair sebelum didistribusikan ke lokasi lain menjadi faktor berpengaruh terhadap naik

turunnya pasokan energi gas alam Turki. Faktor lainnya yaitu kondisi pasar global yang terkait dengan harga gas internasional, persaingan dan penawaran eksklusif dari negara produsen juga berpengaruh pada nilai akhir impor yang diterima Turki.

Pada dasarnya, hubungan Turki dengan Iran sebagai salah satu pemasok gas alam utama merupakan hubungan yang cenderung positif. Kedekatan Turki dan Iran dalam beberapa tahun terakhir juga disebabkan oleh kebijakan luar negerinya yang hampir serupa dalam menangani kasus perlawanan terhadap *axis of resistance* yang didesain oleh Amerika-Israel. Sebagai negara dengan penduduk masyarakat muslim, keberpihakan dan pandangan antara Turki dan Iran memiliki banyak kesamaan. Kondisi naik turun pasokan energi yang diterima oleh Turki dari Iran tidak didominasi oleh hubungan langsung antara kedua negara, melainkan karena persaingan produsen dan juga jumlah permintaan (Dalay, 2021).

Kedekatan Turki dengan negara pemasok utama bukan hanya dilakukan terhadap Iran, namun juga kepada Azerbaijan. Hubungan erat kedua negara ini bahkan dijuluki sebagai “*One Nation, Two States*” yang berarti satu bangsa, dua negara. Hubungan baik tersebut terjalin sejak lama, karena pengaruh konteks regional, ekonomi, serta budaya. Turki dan Azerbaijan seringkali menunjukkan dukungannya terhadap satu sama lain dalam berbagai isu keamanan dan politik, sehingga menjadikan mereka sekutu yang strategis. Seperti pada konflik yang dialami Azerbaijan dan Armenia, Turki secara terang menyatakan dukungannya terhadap Azerbaijan, meskipun tidak terlibat untuk ikut campur secara langsung.

Hubungan timbal balik dalam bidang energi dilakukan kedua negara tersebut, seperti dalam proyek infrastruktur energi *Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline* (TANAP) dimana pipa gas TANAP membawa gas alam dari Azerbaijan menuju pasar Eropa melalui Turki dan Turki yang memberikan bantuan pembangunan kepada Azerbaijan di beberapa bidang. Pada Maret 2020, pertama kalinya dalam sejarah, Azerbaijan menjadi eksportir terbesar gas alam di Turki yang kemudian mengejutkan Rusia dan Iran, hal tersebut menjadikan Azerbaijan menjadi salah satu pemegang saham terbesar di Turki (Gafarli, 2020).

Berbeda dengan Iran dan Azerbaijan, hubungan Turki dengan Rusia relatif lebih kompleks. Terdapat kerjasama antara kedua negara tersebut yang memiliki pengaruh besar satu sama lain sehingga menimbulkan ketergantungan, namun juga terdapat konflik-konflik yang dampaknya merugikan satu sama lain. Turki dan Rusia juga pernah mengalami peperangan, yaitu Perang Rusia-Turki pada 1806-1812 dimana Turki dan Rusia bertempur pada wilayah Rudbar di Kaukasus, kemudian keterlibatan Rusia dan Turki pada Perang Krimea, Perang Rusia-Turki pada tahun 1877-1878, juga pada tahun 2015 dalam krisis Turki dan Rusia, dimana Turki menembak jatuh pesawat tempur Rusia, Sukhoi Su-24 di perbatasan Turki dan Suriah dan berhasil membuat Turki jatuh ke dalam kondisi krisis karena Rusia memberlakukan sanksi ekonomi berupa pemberhentian impor energi terhadap Turki (Cheterian, 2023).

Di sisi lain, Turki memiliki hubungan baik dengan Rusia di berbagai bidang dan melibatkan kerjasama di banyak sektor. Rusia dan Turki sepakat dalam perjanjian antarpemerintah untuk membangun pipa bawah laut dan melakukan

perjanjian pada 15 Desember 1997. Seiring dengan itu, Gazprom, perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Rusia, dan BOTAS, perusahaan di Turki, menandatangani kesepakatan untuk menjual gas selama 25 tahun. Turki dan Rusia juga aktif terlibat dalam konsultasi dan kerjasama diplomatik mengenai isu-isu energi regional dan global, membahas dan berdiskusi kebijakan energi, isu keamanan energi internasional, bahkan menyangkut harga energi global. (Yardimci, 2015).

2.3 Pengaruh Politik Energi Rusia dalam Ketidakstabilan Keamanan

Energi Turki

Hubungan antara Turki dan Rusia didorong oleh sektor ekonomi, perdagangan, dan energi. Pada tahun 2019, volume perdagangan antara kedua negara mencapai 26,309 miliar USD, menjadikan Rusia sebagai mitra dagang terpenting bagi Turki. Investasi dan kerjasama infrastruktur antara keduanya juga signifikan, dengan proyek senilai 75,7 miliar USD yang diselesaikan oleh kontraktor Turki di Rusia sejak tahun 1972. Perusahaan-perusahaan Turki seperti Anadolu Efes, ENKA, dan Zorlu beroperasi di Rusia, sementara Rusia memiliki sekitar 2000 perusahaan di Turki, terutama di sektor energi, manufaktur, dan otomotif.

Sektor energi memegang peran penting dalam hubungan ekonomi Turki-Rusia, dengan Turki mengimpor sebagian besar kebutuhan gas alam dan minyak bumi dari Rusia. Bahkan, Turki menyerahkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya kepada Rusia melalui perusahaan Rosatom. Kebijakan

energi di Turki terkait erat dengan kebijakan dalam negeri dan luar negeri, karena negara ini mengimpor 75% kebutuhan energinya. Meningkatnya kebutuhan energi, terutama gas alam dan minyak bumi, mencerminkan ketergantungan Turki pada Rusia dan negara lain untuk memenuhi kebutuhan sektor energinya (Salsabila. 2023).

Rusia dan Turki merupakan dua negara yang memulai sejarah kerjasama di bidang energi pada pertengahan tahun 1960-an, kerjasama ini juga yang menjadi dasar kedekatan hubungan Turki dan Rusia (pada saat itu disebut *United Socialist Soviet Republic / USSR*) hingga saat ini. Perdana menteri Turki tahun 1965, Suat Hayri Ürgüplü membuat pernyataan, “(Hubungan mengenai energi dan industri) Akan didorong untuk meningkatkan penanaman modal asing yang akan membantu meningkatkan kehidupan perekonomian kita (Turki), asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional kita.” dan “... Kami dengan tulus ingin menjaga hubungan bertetangga yang baik dengan Uni Soviet”. Pernyataan tersebut menjadi titik balik kerjasama Turki dengan Uni Soviet di bidang energi. Kesepakatan diberitakan secara resmi pada 2 Juni 1967. Sejak saat itu, kerjasama disahkan dan kedua negara meningkatkan tingkat perdagangan dan juga saling berbagi pandangan bahwa keduanya akan berkontribusi pada perekonomian nasional (Uksai, et. al., 2021).

Pada tahun 1972, presiden presidium tertinggi Uni Soviet, Nikolay Podgorni datang ke Istanbul dan merealisasikan tingkat kerjasama kedua negara. Kunjungan tersebut berdampak luar biasa terhadap hubungan bilateral Turki dan Uni Soviet. Selanjutnya, pada masa jabatan pertama Turgut Özal (presiden Turki

pada 13 Oktober 1927-17 April 1993) proses kerjasama mengenai gas alam dimulai. Sebuah perjanjian internasional mengenai gas ditandatangani pada 18 September 1984 dan memiliki agenda untuk melakukan transfer gas alam pertama Turki ke negaranya melalui kerjasama pipa minyak atau biasa disebut BOTAS, agenda tersebut sekaligus menjadi agenda utama pada tahun 1986 (Uksai, et. al., 2021).

Turki memerlukan keamanan energi yang konsisten dan hal tersebut perlu diprioritaskan karena Turki tidak memproduksi pasokan energinya sendiri. Sementara itu, sejak tahun 2000an, Rusia merupakan aktor utama yang sangat erat kaitannya dengan “agresi energi”, dimana mayoritas menggunakan cadangan gas alamnya sebagai alat politik dan kebijakan Rusia mengenai energi terhadap negara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, tergantung hubungan yang dijalin (Göral, 2023).

Meskipun hubungan baik dan kerjasama saling menguntungkan telah diadopsi Turki dan Rusia, namun hal tersebut tidak membuat konflik terhindar. Bahkan, ketegangan atau konflik yang dialami Rusia dengan negara lain pun berdampak besar terhadap kestabilan energi Turki dan negara yang mengandalkan Rusia sebagai produsen gas alamnya. Rusia memanfaatkan energi sebagai alat untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politiknya di luar negeri. Mereka menggunakan gas sebagai instrumen politik luar negeri dan menerapkan kebijakan yang memaksa negara lain patuh terhadap aturan yang mereka tetapkan.



Gambar 1. Peta negara Eropa yang terkena dampak krisis gas alam

Source : bbc.co.uk, 2019

Konflik gas antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2006 dan 2009 dan berimplikasi terhadap krisis energi wilayah Eropa, termasuk Turki. Kejadian berulang tersebut disebabkan adanya hutang serta kegagalan dalam membuat kesepakatan untuk harga gas yang dilakukan oleh Rusia dan Ukraina sebagai negara distributor. Ukraina mengajukan proposal harga gas sebesar \$201 per 1.000 meter kubik kepada Gazprom, yang kemudian direvisi menjadi \$235, sementara Gazprom menuntut harga sebesar \$250 per 1.000 meter kubik. Keduanya gagal mencapai kesepakatan, mengakibatkan terhentinya negosiasi. Pada 1 Januari 2009, ekspor gas Rusia ke Ukraina dibekukan sepenuhnya. Rusia mencurigai adanya pencurian gas oleh Ukraina sejak penghentian pengiriman pada tanggal 1 Januari (Ningrum, 2019)

Pasokan gas dari Rusia ke 17 negara Eropa telah dihentikan. Hal tersebut tentu menyebabkan ratusan ribu warga di Eropa timur dan tenggara menghadapi ketidaktersediaan gas. Presiden Polandia Lech Kaczynski, yang negaranya

seungguhnya bergantung pada gas Rusia, akan mengadakan pertemuan dengan presiden Ukraina Victor Yushenko untuk membahas krisis ini. Negara-negara seperti Slovakia dan Baltik juga tergantung sepenuhnya pada gas Rusia. Parlemen Eropa menyatakan bahwa Bulgaria terpaksa menutup sekolah dan gedung pemerintah karena krisis tersebut (bbc.co.uk, 2009)

Kondisi krisis tersebut kemudian menimbulkan kesadaran akan perlunya mencari alternatif rute yang tidak melalui wilayah Ukraina untuk memenuhi kebutuhan distribusi energi Eropa. Dengan posisi geografis Turki yang strategis, negara tersebut dapat menjadi solusi yang sangat potensial sebagai pusat transit. Pada 26 Juni 2012, Pemerintah Turki menandatangani kesepakatan dengan Azerbaijan untuk memulai proyek pembangunan pipa gas alam yang dikenal sebagai *Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline System* (TANAP). Proyek ini merupakan bagian dari proyek *Southern Gas Corridor* yang bertujuan untuk mendistribusikan pasokan gas alam dari Laut Kaspia ke pasar energi di Eropa (Varianto, 2023).

Pentingnya potensi geografis Turki dalam menyediakan rute alternatif ini tidak hanya disadari oleh Uni Eropa, tetapi juga oleh Rusia. Konflik politik di Ukraina pada awal 2014 dan upaya aneksasi Semenanjung Krimea oleh Rusia menyempitkan ruang manuver Rusia dalam kerja sama sektor energi. Versi terbaru dalam proyek pipa gas alam, TANAP, menjadi satu elemen dari strategi yang diambil Rusia dalam mencari jalur alternatif untuk menghubungkan pasokan energinya ke pasar Eropa. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui proyek

Nord Stream dengan Jerman di Laut Baltik dan proyek TurkStream dengan Turki di Laut Hitam (Varianto, 2023).

Turki mengalami krisis lainnya adalah pada konflik Rusia dan Suriah. Akibat dari kesalahpahaman di antara kekuatan militer yang beroperasi di dekat wilayah satu sama lain yaitu muncul dampak yang tidak terduga dan tidak diinginkan. Penembakan pesawat militer Rusia oleh Turki pada 24 Oktober 2015 adalah hasil langsung dari dampak tersebut. Pesawat itu jatuh di dekat perbatasan Suriah, serta menewaskan salah satu pilot Rusia. Turki menyatakan bahwa mereka bertindak dalam pertahanan diri terhadap wilayah mereka, dan mereka telah menyerukan pembentukan zona larangan terbang di utara Suriah untuk menghindari situasi tegang semacam ini. Pemerintah Turki juga menegaskan bahwa pesawat militer tersebut telah diperingatkan sepuluh kali selama lima menit karena melanggar wilayah udara mereka (Zanella, 2015).

Pasca kejadian tersebut, Erdogan melakukan upaya untuk menghubungi Putin, namun Presiden Rusia tersebut menolak pembicaraan maupun diskusi apapun dan hanya akan menerima jika Erdogan mengemukakan permintaan maafnya. Namun, secara terbuka Turki menolak hal tersebut karena Turki merasa bahwa sudah tugas negaranya untuk melakukan perlindungan wilayah. Rusia kemudian melakukan embargo ekonomi serta larangan penerbangan menuju wilayah Turki. Dampaknya terutama terasa di Turki, dimana Rusia melakukan embargo energi dan larangan terhadap semua penerbangan charter antara kedua negara mempengaruhi terutama sektor pariwisata dan eksportir buah-buahan serta sayur-sayuran. Selain itu, embargo ini juga berpotensi mempengaruhi kontrak

baru bagi perusahaan konstruksi Turki di Rusia, dengan pemerintah melakukan analisis yang lebih ketat yang akhirnya dapat melarang perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengajukan penawaran proyek di Rusia. Di sisi Rusia, menutup pintu bagi pemasok makanan lainnya dapat meningkatkan tekanan inflasi pada rubel. Mata uang Rusia telah mengalami penurunan nilai yang signifikan sejak pertengahan tahun 2014, terutama karena harga minyak yang merosot, dimana hal tersebut merupakan pendapatan utama Rusia. Karena sama-sama merugikan kedua belah pihak, konflik diselesaikan saat presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan meminta maaf kepada Vladimir Putin yang ditindaklanjuti membuat perjanjian mengenai peranan mereka dalam konflik Suriah. (Cheterian, 2023).

Pada tahun 2022, Invasi Rusia ke Ukraina memberikan tekanan yang meningkat pada Turki untuk memilih antara Rusia dan Barat. Hasil dari perang Rusia-Ukraina akan merugikan Turki dan pengaruhnya di Laut Hitam karena konflik tersebut dapat menciptakan kekosongan atau ketidakstabilan di wilayah tersebut. Turki memiliki kepentingan strategis di Laut Hitam dan memperoleh banyak manfaat dari stabilitas di wilayah tersebut. Namun, jika terjadi konflik yang intens antara Rusia dan Ukraina, hal ini dapat mengakibatkan ketegangan yang lebih besar di wilayah Laut Hitam dan mungkin menyebabkan Turki harus berhadapan dengan konsekuensi negatif, seperti meningkatnya kehadiran militer asing di wilayah tersebut atau ketidakpastian politik yang lebih besar. Dilema strategis Turki dengan Rusia diungkapkan dengan baik oleh seorang penasihat senior Presiden Turki: 'Rusia bukan sekutu, bukan musuh, tetapi kita tidak bisa

bernegosiasi jika kita terlalu bergantung pada mereka, terutama ketika masalahnya adalah energi' (Cheterian, 2023)